

Nama : Habibah Husnul Khotimah
NPM : 2523031006
Mata Kuliah : Studi Sosial Ekonomi dan Kewirausahaan
Dosen Pengampu : Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd., dan Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd., Dr. Niki Tri Sakung, M.Pd.

UJIAN TENGAH SEMESTER

1. Analisis komprehensif dari kasus pendapatan nelayan menurun drastis, angka kemiskinan meningkat, dan terjadi migrasi tenaga kerja ke kota.

Analisis akar permasalahan dengan menggunakan pendekatan multidisiplin antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

- a. Aspek Ekonomi terjadi eksploitasi sumber daya secara berlebihan (*overfishing*) yang mencerminkan kegagalan mekanisme pasar dalam mengelola sumber daya bersama (*common pool resources*). Nelayan cenderung memaksimalkan tangkapan tanpa mempertimbangkan keinginan, sehingga stok ikan menurun. Selain itu, ketergantungan ekonomi pada sektor perikanan tunggal membuat masyarakat rentan terhadap guncangan.
- b. Aspek Lingkungan berkaitan dengan iklim yang menyebabkan naiknya suhu laut, perubahan arus, dan rusaknya habitat Ikan (seperti terumbu karang). Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (misalnya pukat harimau atau bom ikan) memperparah degradasi ekosistem laut. Hal ini menunjukkan adanya kerusakan ekologis yang berdampak langsung pada produktivitas sumber daya.
- c. Aspek Sosial yaitu rendahnya kesadaran dan literasi lingkungan masyarakat nelayan menjadi faktor penting. Selain itu, tekanan ekonomi mendorong praktik eksploitasi secara berlebihan. Ketimpangan akses terhadap teknologi ramah lingkungan dan lemahnya kelembagaan lokal juga melemahkan kondisi. Migrasi tenaga kerja ke kota menunjukkan adanya gangguan sosial dan hilangnya mata pencaharian lokal.

Evaluasi kebijakan pemerintah berupa subsidi. Subsidi yang telah diberikan kepada masyarakat cenderung bersifat jangka pendek (kuratif), bukan jangka panjang (preventif dan struktural). Pada dasarnya, adanya kebijakan subsidi tersebut untuk menjadi solusi atas permasalahan para nelayan. Namun, kebijakan tersebut belum efektif karena tidak terintegrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sehingga menjadi kelemahan kebijakan tersebut, antara lain:

- a. Tidak menyentuh akar masalah: Subsidi hanya membantu pendapatan sementara tanpa memperbaiki sistem produksi atau ekosistem.
- b. Potensi ketergantungan: Nelayan menjadi bergantung pada tanpa meningkatkan kemandirian.
- c. Kurangnya pengawasan: Tidak diiringi regulasi ketat terhadap praktik penangkapan ikan ilegal atau destruktif.
- d. Pendekatan minim partisipatif: Kebijakan top-down tanpa melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan implementasi.

Solusi harus bersifat holistik, partisipatif, dan berkelanjutan, dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama.

- a. Pengelolaan sumber daya berbasis komunitas dengan melibatkan nelayan dalam pengaturan zona penangkapan, musim penangkapan, dan jenis alat tangkap. Dengan ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap sumber daya.
- b. Diversifikasi Ekonomi berupa alternatif mata pencaharian seperti: Budidaya perikanan (akuakultur), Ekowisata pesisir, Pengolahan hasil laut bernilai tambah
- c. Penggunaan teknologi ramah lingkungan melalui pemberian pelatihan dan bantuan alat penangkapan yang berkelanjutan, seperti jaring isolasi.
- d. Program rehabilitasi ekosistem laut seperti contohnya penanaman mangrove, restorasi terumbu karang, dan perlindungan kawasan konservasi laut.
- e. Penguatan kelembagaan lokal dengan tujuan untuk membentuk koperasi nelayan untuk memperkuat akses pasar, modal, dan informasi.
- f. Edukasi dan literasi lingkungan melalui program penyuluhan berkelanjutan mengenai pentingnya menjaga ekosistem laut.

Pendidikan IPS memiliki peran penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan penurunan hasil tangkapan ikan di daerah pesisir karena mampu mengintegrasikan pemahaman aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara utuh. Melalui pembelajaran yang kontekstual, IPS dapat menumbuhkan kesadaran siswa dan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap praktik seperti penangkapan ikan yang berlebihan dan penggunaan alat tangkap yang merusak. Selain itu, IPS turut serta dalam menanamkan nilai-nilai tanggung jawab sosial, kepedulian lingkungan, dan solidaritas komunitas, sehingga mendorong partisipasi aktif

masyarakat dalam menjaga ekosistem pesisir. Tidak hanya itu, melalui pendekatan berbasis proyek dan masalah nyata, IPS juga dapat membekali peserta didik dengan keterampilan untuk mencari solusi inovatif, seperti diversifikasi ekonomi dan pemberdayaan nelayan.

2. Pandangan tentang ekonomi di era digital, potensi kewirausahaan dan partisipasi wanita dalam perkembangan dunia usaha dan industri, serta peran pemerintah dalam mensikapi ketimpangan persentase laki-laki yang bekerja di industri 3x lebih besar dibandingkan dengan perempuan.

Pandangan tentang ekonomi di era digital merupakan transformasi besar dalam sistem produksi, distribusi, dan konsumsi yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi, internet, dan platform digital. Ekonomi digital membuka peluang yang luas karena mengurangi hambatan masuk (*barrier to entry*), memungkinkan individu termasuk kelompok yang sebelumnya termarginalkan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi seperti e-commerce, freelancing, dan pembuatan konten. Namun, di balik peluang tersebut, tantangan berupa kesenjangan digital (*digital gap*), ketimpangan terdapat akses terhadap teknologi, serta dominasi platform besar yang dapat menciptakan ketergantungan ekonomi baru. Dengan demikian, ekonomi digital bersifat ambivalen di satu sisi inklusif dan membuka peluang, namun di sisi lain berpotensi memperlebar penilaian jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang adil.

Potensi kewirausahaan digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia usaha dan industri. Fleksibilitas waktu dan tempat memungkinkan perempuan untuk menyeimbangkan peran domestik dan ekonomi. Selain itu, platform digital memberikan akses pasar yang lebih luas tanpa memerlukan modal besar seperti bisnis konvensional. Oleh karena itu, kewirausahaan digital dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi perempuan serta alat untuk mengurangi diskriminasi di dunia kerja formal. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih adanya hambatan struktural, seperti norma sosial yang membatasi peran perempuan, rendahnya literasi digital, keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan, serta kurangnya dukungan jaringan (*networking*). Artinya, meskipun peluangnya terbuka lebar, realisasi partisipasi perempuan masih dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang mengakar.

Peran pemerintah dalam mengatasi ketimpangan gender di sektor digital melalui kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan berbasis digital, khususnya bagi perempuan, seperti pelatihan keterampilan teknologi, kewirausahaan digital, dan literasi keuangan. Kedua, diperlukan kebijakan afirmatif berupa dukungan pembiayaan (misalnya kredit usaha mikro berbasis gender) dan inkubasi bisnis bagi wirausaha perempuan. Ketiga, pemerintah harus memperkuat regulasi yang mendorong kesetaraan gender di sektor industri digital, termasuk perlindungan terhadap diskriminasi di tempat kerja. Keempat, pembangunan infrastruktur digital yang merata juga penting agar perempuan di daerah terpencil memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi digital. Terakhir, kampanye perubahan sosial perlu dilakukan untuk menggeser norma patriarki yang membatasi peran perempuan dalam bidang ekonomi.

3. Keterkaitan ekonomi dalam konteks pembelajaran IPS; Desain pembelajaran ekonomi dan kewirausahaan di sekolah; dan contoh penerapan di sekolah.

Dalam pembelajaran IPS, ekonomi merupakan salah satu pilar utama yang tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Konsep seperti kebutuhan, kelangkaan, produksi, distribusi, dan konsumsi dipahami dalam konteks kehidupan nyata ekonomi masyarakat, sehingga siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga memahami dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Misalnya, kegiatan ekonomi masyarakat pesisir tidak hanya berkaitan dengan produksi ikan, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya lokal, kondisi lingkungan, serta kebijakan pemerintah. Dengan demikian, pembelajaran ekonomi dalam IPS bersifat kontekstual, multidisipliner, dan bertujuan membentuk kemampuan berpikir kritis serta kesadaran sosial-ekonomi siswa.

Desain pembelajaran ekonomi dan kewirausahaan di sekolah agar mampu mengembangkan keterampilan dan jiwa wirausaha, pembelajaran ekonomi dan kewirausahaan seharusnya tidak hanya berbasis teori, tetapi dirancang secara aktif, kontekstual, dan berbasis pengalaman nyata; Pembelajaran Berbasis Proyek Berbasis (PjBL). Siswa diberikan proyek nyata untuk merancang dan menjalankan usaha sederhana. Melalui proses ini, siswa belajar perencanaan bisnis, manajemen keuangan, pemasaran, hingga evaluasi usaha; Kontekstual dan berbasis lingkungan sekitar dengan cara menghubungkan materi pembelajaran dengan potensi lokal agar lebih relevan. Hal ini membantu siswa melihat peluang usaha di lingkungan mereka sendiri; Integrasi

literasi digital pembelajaran kewirausahaan perlu memasukkan penggunaan media sosial, marketplace, dan teknologi digital sebagai sarana bisnis; Kolaboratif dan berbasis pengalaman siswa; Penanaman nilai (sikap), seperti kreativitas, kemandirian, tanggung jawab, dan keberanian mengambil risiko.

Contoh penerapan di sekolah: Proyek kewirausahaan berbasis potensi lokal.

Siswa di daerah seperti Lampung dapat mengembangkan usaha berbasis komoditas lokal, misalnya olahan pisang atau kopi.

1. Siswa melakukan riset pasar sederhana
2. Membuat produk (misalnya keripik pisang kemasan modern)
3. Menentukan harga dan strategi pemasaran
4. Menjual produk secara langsung atau melalui media sosial

4. Keterkaitan pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan kesejahteraan; Pentingnya keseimbangan pembangunan ekonomi, manusia, dan lingkungan; Mewujudkan SDM unggul melalui pendidikan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan; Contoh nyata keinginan ekonomi dan pembangunan manusia di wilayah (konteks Indonesia, termasuk Lampung).

Pertumbuhan penduduk, khususnya usia kerja, memiliki hubungan erat dengan kondisi ekonomi dan tingkat kesejahteraan. Di satu sisi, peningkatan jumlah penduduk usia produktif dapat menjadi bonus demografi yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan tenaga kerja dan produktivitas. Namun, jika tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang layak, justru akan menimbulkan kemiskinan, pekerjaan informal, dan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup; kualitas pertumbuhan (inklusif dan berkeadilan) menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan. Dengan kata lain, tanpa adanya distribusi kesempatan kerja yang merata, pertumbuhan penduduk dapat menjadi beban ekonomi dan memperlemah kesejahteraan masyarakat.

Keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pembangunan manusia, dan lingkungan penting karena ketiganya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pembangunan ekonomi yang hanya berorientasi pada pertumbuhan tanpa memperhatikan kualitas manusia akan menghasilkan ketimpangan dan rendahnya daya penghematan tenaga kerja. Sementara itu, pembangunan yang mengabaikan lingkungan akan menyebabkan kerusakan sumber daya alam yang justru mengancam punahnya perekonomian di masa depan. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan berkelanjutan

menekankan pada integrasi ketiga aspek tersebut agar tercipta kesejahteraan jangka panjang, keadilan sosial, serta kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

SDM unggul dapat diwujudkan melalui pendidikan yang berkualitas, relevan dengan kebutuhan zaman, dan terintegrasi dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, literasi digital, dan kesadaran lingkungan. Selain itu, perlu adanya keterkaitan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja melalui pelatihan vokasi, kewirausahaan, dan pengembangan keterampilan berbasis teknologi. Dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan, SDM juga harus memiliki nilai-nilai tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga mampu menciptakan inovasi ekonomi yang tidak merusak alam. Dengan demikian, pendidikan menjadi landasan utama dalam menciptakan tenaga kerja yang produktif, adaptif, dan berdaya saing global.

Salah satu contoh nyata dapat dilihat pada pengembangan UMKM berbasis digital dan potensi lokal di daerah seperti Lampung. Banyak pelaku usaha kecil mulai memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk khas daerah seperti kopi, kerajinan tapis, dan produk olahan pangan. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja baru. Selain itu, program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah daerah maupun lembaga pendidikan juga meningkatkan kualitas SDM. Di sisi lingkungan, beberapa wilayah pesisir di Lampung juga mulai melakukan rehabilitasi mangrove dan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Kegiatan ini menciptakan keseimbangan antara peningkatan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Contoh tersebut menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan melalui sinergi antara inovasi ekonomi, peningkatan kualitas manusia, dan pelestarian lingkungan.

5. Analisis tantangan utama UMKM Indonesia dalam ekonomi digital dan globalisasi; Rancangan model pembelajaran IPS berbasis kewirausahaan; dan Integrasi konsep kewirausahaan berkelanjutan dalam model.

UMKM Indonesia menghadapi tantangan yang bersifat struktural dan kultural dalam memasuki ekonomi digital. Pertama, rendahnya literasi digital menyebabkan pelaku UMKM belum optimal memanfaatkan platform *e-commerce*, digital marketing, maupun sistem pembayaran digital. Kedua, keterbatasan akses pasar global disebabkan

oleh rendahnya kemampuan branding, standar kualitas produk, serta minimnya pemahaman ekspor-impor. Ketiga, berkurangnya inovasi berbasis kehausan membuat produk UMKM kurang kompetitif di pasar global yang kini semakin menuntut aspek ramah lingkungan (*eco-friendly*) dan etis. Selain itu, terdapat kendala lain seperti keterbatasan modal, lemahnya jaringan usaha, serta ketergantungan pada pola bisnis konvensional. Dalam konteks globalisasi, UMKM tidak hanya bersaing secara lokal tetapi juga dengan produk internasional, sehingga membutuhkan transformasi menyeluruh baik dari segi teknologi, kualitas produk, maupun pola pikir kewirausahaan.

Rancangan model pembelajaran IPS berbasis kewirausahaan yang dapat digunakan adalah “Project-Based Entrepreneurship Learning berbasis IPS (PjBL-IPS)”, yaitu pembelajaran berbasis proyek yang mengintegrasikan konsep ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Model Sintaks:

- a. Identifikasi masalah kontekstual: Siswa menganalisis masalah ekonomi nyata di lingkungan sekitar (misalnya UMKM lokal yang belum go digital).
- b. Eksplorasi konsep IPS: Mengaitkan masalah dengan konsep ekonomi (produksi, distribusi), sosial (perilaku konsumen), dan globalisasi.
- c. Perancangan ide bisnis: Siswa merancang usaha berbasis potensi lokal dengan pendekatan inovatif (misalnya produk lokal yang dijual melalui e-commerce).
- d. Implementasi proyek usaha sederhana seperti; membuat produk, membuat branding, memasarkan melalui media digital
- e. Evaluasi dan refleksi dengan menganalisis keuntungan, kendala, serta dampak sosial dan lingkungan dari usaha yang dijalankan. Hasil pembelajaran; Keterampilan berpikir kritis dan kreatif, Literasi digital dan finansial, Jiwa kewirausahaan (inisiatif, inovasi, keberanian risiko)

Integrasi konsep kewirausahaan berkelanjutan (*sustainable entrepreneurship*) memuat keseimbangan antara keuntungan ekonomi, keinginan lingkungan, dan kesejahteraan sosial (*triple bottom line*). Dalam model PjBL-IPS, integrasi dilakukan melalui:

- a. Pemilihan ide bisnis ramah lingkungan
Siswa didorong untuk menciptakan produk berbasis daur ulang, pengurangan limbah, atau bahan alami.

- b. Analisis dampak sosial dan lingkungan
Setiap proyek tidak hanya diukur dari keuntungannya, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.
- c. Penguatan nilai dan etika bisnis
Menanamkan nilai tanggung jawab sosial, keadilan, dan keinginan dalam setiap aktivitas usaha.
- d. Penggunaan teknologi digital yang bijak
Memanfaatkan e-commerce untuk efisiensi tanpa meningkatkan jejak karbon secara berlebihan.
- e. Kolaborasi dengan komunitas lokal
Mengintegrasikan usaha dengan pemberdayaan masyarakat (misalnya melibatkan pengrajin lokal).

Referensi:

- Asikin, M. Z., & Fadilah, M. O. 2024. Masa depan kewirausahaan dan inovasi: tantangan dan dinamika dalam era digital. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(1), 303-310.
- Kurniawan, A., Wulan, T. R., & Muslihudin, M. 2023. *Pengembangan potensi desa wisata di Banyumas menuju pembangunan perdesaan berkelanjutan*. *Jurnal Ilmiah Membangun Desa Dan Pertanian*, 8(5), 169-181.
- Lailiyah, N. M. J. 2025. *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Usaha UMKM di Kebumen: Keterampilan Digital, Kelincahan Organisasi, dan Pengambilan Risiko* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Maya, P. M. U., Soemitra, A., & Majid, M. S. A. 2025. *Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kewirausahaan: Tinjauan sistematis atas hambatan struktural, kendala partisipatif, dan dukungan sosial*. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 7(2), 424-435.
- Pritandhari, M., & Sandi, G. 2025. *Strategi Pembelajaran Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan Berbasis Project-Based Learning dalam Meningkatkan Minat Berwirausaha*. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 968-974.
- Purba, D. S., Permatasari, P. D., Tanjung, N., Rahayu, P., Fitriani, R., & Wulandari, S. 2025. Analisis perkembangan ekonomi digital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1).
- Sari, W. P., Rahmania, M., & Wati, W. 2025. *Kemampuan Technopreneur Melalui Project Based Learning dengan E-Modul Kewirausahaan berbasis Book Creator*. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, 8(1), 49-61.